



**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

**Dimas Ariyawan Santoso<sup>a\*</sup>, Maya Widyana Dewi<sup>b</sup>, Sri Laksmi Pardanawati<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Prodi Akuntansi, [dariyawan@gmail.com](mailto:dariyawan@gmail.com), Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

<sup>b</sup> Prodi Akuntansi, [widyamine77@gmail.com](mailto:widyamine77@gmail.com), Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

<sup>c</sup> Prodi Akuntansi, [laksmi.stie.aas@gmail.com](mailto:laksmi.stie.aas@gmail.com), Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Jawa Tengah

\* Korespondensi

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of revenue sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds on capital expenditures of Regency/City Governments in West Java. This study uses secondary data in the form of quantitative data contained in regional financial statistics reports from APBD and TKDD reports. Data collection techniques are obtained through documentation and literature studies. The population in this study was 27 Regencies/Cities in West Java, with a sample size of 135 taken using the purposive sampling method. The data analysis method used is descriptive statistics, classical assumption tests in the form of normality tests, multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, and hypothesis testing in the form of multiple linear regression analysis, F test, t test, and R<sup>2</sup> test. The results of the study indicate that Revenue Sharing Funds have a positive effect on Capital Expenditures with a significance value of  $0.003 < 0.05$  and a t count value of  $3.041 > 1.65648$  t table. General Allocation Fund has a positive effect on Capital Expenditure with a significance value of  $0.000 < 0.05$  and a t count value of  $4.330 > 1.65648$  t table. While the Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure with a significance value of  $0.743 > 0.05$  and a t count value of  $0.329 < 1.65648$  t table.*

*Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang termuat dalam laporan statistik keuangan daerah dari laporan APBD dan TKDD. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan jumlah sampel sebanyak 135 yang diambil menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan pengujian hipotesis berupa analisis regresi linear berganda, uji F, uji t, dan uji R<sup>2</sup>. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 3,041 > 1,65648$   $t_{tabel}$ . Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 4,330 > 1,65648$   $t_{tabel}$ . Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar  $0,743 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 0,329 < 1,65648$   $t_{tabel}$ .

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil

**1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas pembangunan daerah secara berkelanjutan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangan serta meningkatkan daya saing melalui pemberdayaan fiskal lokal.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. APBD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, dan penerimaan sah lainnya. Sementara itu, belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara jenis belanja dalam APBD, belanja modal menempati posisi strategis karena secara langsung berkontribusi pada penciptaan aset tetap yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Salah satu sumber pembiayaan utama dalam APBD berasal dari dana transfer pemerintah pusat, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH merupakan dana yang dibagikan berdasarkan proporsi penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam di daerah tertentu, dan memiliki potensi signifikan dalam mendukung belanja modal. DAU bersifat non-spesifik, memungkinkan pemerintah daerah menggunakannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, DAK dialokasikan secara spesifik untuk membiayai program atau proyek tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh ketiga jenis dana transfer ini terhadap belanja modal daerah. Penelitian oleh Chika Angellia (2022)[1] serta Marheni dan Triyanto (2023)[2] menemukan bahwa DBH dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, Nugroho dan Hardi (2018)[3] menemukan bahwa DBH dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial di Provinsi Jawa Barat. Demikian pula, hasil penelitian terkait DAK menunjukkan hasil yang beragam. Widiyanto (2020)[4] menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal, sedangkan Aqnisa (2016)[5] menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh dana transfer pusat terhadap belanja modal sangat dipengaruhi oleh konteks fiskal dan kapasitas pengelolaan anggaran masing-masing daerah.

Fenomena ini menegaskan pentingnya analisis yang lebih mendalam dan terkini terhadap hubungan antara DBH, DAU, dan DAK dengan belanja modal. Terlebih lagi, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, memiliki variasi karakteristik fiskal antar kabupaten/kota yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur kebijakan fiskal daerah serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan lokal.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui bersama DPRD. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diperkuat dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. APBD menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan merupakan wujud kerja sama legislatif dan eksekutif di daerah[6].

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa APBD menjadi acuan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang selaras dengan kebijakan publik[7]. APBD berperan sebagai alat kebijakan fiskal strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sebelumnya (Angellia, 2022)[1].

APBD terdiri dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan sah lainnya. PAD menjadi indikator kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri..

## 2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dalam APBD yang diarahkan pada investasi jangka panjang berupa aset tetap seperti pembangunan infrastruktur (UU RI No. 17 Tahun 2003)[8]. Belanja ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik berkelanjutan. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020[9], belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung, di mana belanja modal tergolong dalam belanja langsung karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menegaskan bahwa belanja modal ditujukan untuk pembentukan aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Mardiasmo dalam Putri (2022)[10] menyebutkan bahwa belanja modal merupakan belanja produktif karena mendorong pertumbuhan kapasitas infrastruktur dan investasi daerah.

### Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.02/2015[11], jenis belanja modal terdiri dari:

- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah,
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya,
- f. Belanja Modal untuk Badan Layanan Umum (BLU).

Jenis-jenis ini berfokus pada pembangunan aset yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan layanan publik.

### Peranan Belanja Modal

Belanja modal berperan penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan infrastruktur yang mempercepat mobilitas dan produktivitas masyarakat. Belanja ini juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pengelolaan belanja modal harus mematuhi prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Evaluasi keberhasilan belanja modal meliputi indikator tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat harga.

## 2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan pendapatan APBN. DBH bertujuan memperkuat otonomi daerah dan mewujudkan pemerataan fiskal (UU RI No. 33 Tahun 2004)[12]. DBH terbagi atas sumber dari sektor perpajakan dan sumber daya alam, seperti PBB, PPh, BPHTB, hasil hutan, tambang, minyak bumi, gas, dan sebagainya. DBH menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal dan bertanggung jawab.

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi fiskal daerah (UU RI No. 33 Tahun 2004)[12]. Tujuannya untuk pemerataan kapasitas keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Alokasi DAU didasarkan pada selisih antara pendapatan daerah dan beban belanja pegawai. Ketimpangan fiskal diselesaikan melalui redistribusi fiskal agar semua daerah memiliki akses setara terhadap layanan publik. Penyaluran DAU minimal sebesar 26% dari total Penerimaan Dalam Negeri (PP No. 84 Tahun

2001), dan diperhitungkan berdasarkan tingkat kemiskinan untuk menjamin pemerataan pembangunan (Nugroho & Hardi, 2018)[3].

### 2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer yang ditujukan untuk mendanai kegiatan spesifik sektor prioritas nasional di daerah. DAK bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (UU RI No. 33 Tahun 2004)[12].

DAK memperkuat fungsi pelayanan publik dan pembangunan fisik serta mendorong akuntabilitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Chika Angellia (2022)[1] dan Nugroho & Hardi (2018)[3] menekankan pentingnya DAK dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan peningkatan pelayanan dasar di daerah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada sekumpulan objek atau subjek yang memiliki ciri-ciri khusus dan jumlah yang dapat dikenali, yang ditentukan oleh peneliti sebagai objek yang akan dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian (Sugiyono, 2019)[13]. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2023. Kemudian sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kriteria-kriteria tersebut menjadi dasar dalam pengambilan sampel penelitian ini.

- a. Kabupaten/Kota yang kontinyu melaporkan laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan yang mencakup variabel penelitian.

Sehingga didapatkan sampel sebanyak 135 terdiri dari 27 kabupaten/kota selama 5 tahun.

### 3.2 Data Penelitian

#### 3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019)[13], data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif (berupa kata, kalimat, gambar) dan kuantitatif (berupa angka atau hasil pengukuran). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti jurnal online, buku, dan internet. Data yang digunakan mencakup laporan statistik keuangan daerah, khususnya APBD dan TKDD (DBH, DAU, DAK) untuk kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2019–2023.

#### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu mengacu pada Sugiyono (2019)[13], teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui dokumen, laporan, catatan, dan media lainnya. Peneliti mengumpulkan data keuangan daerah seperti anggaran, pendapatan, dan belanja dari pemerintah daerah Jawa Barat. Kemudian menggunakan Studi Kepustakaan adalah cara dilakukan melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Teknik ini memperkuat landasan teori dan memperkaya analisis melalui berbagai referensi akademik yang diperoleh dari sumber digital dan publikasi resmi.

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian yang dilakukan setelah seluruh informasi yang diperoleh dari responden atau sumber data lainnya telah terkumpul secara lengkap dan siap untuk diolah (Sugiyono, 2019)[13]. Metode pada penelitian ini menggunakan Analisis Statistik Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik umum data, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Sugiyono, 2019)[13]. Sedangkan Pengujian Asumsi Klasik terdapat Uji Normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan histogram untuk menilai apakah residual tersebar normal. Data dianggap normal jika  $p\text{-value} > 0,05$ . Jika tidak normal, dilakukan penanganan melalui identifikasi *outlier* atau transformasi data (Ghozali, 2018)[14], Uji Multikolinieritas untuk memastikan tidak adanya korelasi tinggi antarvariabel independen. Pengujian menggunakan nilai *Tolerance* ( $> 0,1$ ) dan *Variance Inflation Factor* ( $VIF < 10$ ). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2018)[14], Uji Autokorelasi untuk mendeteksi hubungan antar residual pada data runtun waktu. Uji dilakukan dengan Durbin-Watson Test dan Run Test. Nilai Durbin-Watson berada dalam rentang antara  $du < d < 4-du$  untuk menyatakan tidak adanya autokorelasi (Ghozali, 2018)[14], dan Uji Heteroskedastisitas menguji kesamaan varians residual antar observasi. Pengujian dilakukan melalui analisis grafik scatterplot

antara nilai prediksi dan residual (Ghozali, 2018)[14]. Heteroskedastisitas tidak ditemukan apabila sebaran titik acak dan tidak membentuk pola tertentu

### 3.4 Uji Hipotesis

Pengujian ini menggunakan beberapa uji diantaranya Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen Sugiyono (2019)[13], untuk persamaan regresi linier berganda adalah  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$ , Ghozali (2018)[14], Uji F merupakan alat analisis statistik dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan syarat nilai signifikan (0,05) dan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh dengan nilai  $F_{tabel}$  yang telah ditentukan, Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan syarat nilai signifikan (0,05) dan serta membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  [14], Menurut Ghozali (2018)[14] memiliki peran sentral dalam menilai seberapa baik suatu model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Uji Koefisien Determinasi untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, khususnya dengan merujuk pada nilai Adjusted R-Square yang dianggap lebih akurat dalam mengakomodasi jumlah variabel yang digunakan dalam model Ghozali (2018)[14].

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif tujuan utamanya adalah menyajikan karakteristik data melalui ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), serta simpangan baku (standar deviasi). Dalam konteks penelitian ini, data yang dianalisis mencakup 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019 hingga 2023. Dengan demikian, total pengamatan yang digunakan dalam analisis adalah sebanyak 135.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Dana Bagi Hasil	135	3,77	6,58	4,9823	0,66158
Dana Alokasi Umum	135	5,85	7,68	6,9507	0,44442
Dana Alokasi Khusus	135	4,26	7,34	5,9943	0,63107
Belanja Modal	135	4,05	7,44	6,0348	0,70600
Valid N (listwise)	135				

Hasil Pengujian Statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Diketahui bahwa jumlah observasi untuk variabel DBH adalah sebanyak 135. Nilai terkecil yang tercatat adalah 3,77, sedangkan nilai tertingginya mencapai 6,58. Rata-rata dari seluruh data DBH adalah 4,9823, menunjukkan besaran umum alokasi DBH yang diterima oleh kabupaten dalam periode penelitian. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 0,66158 menunjukkan tingkat penyebaran data DBH dari nilai rata-ratanya.

#### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel DAU juga dianalisis menggunakan 135 data observasi. Nilai minimum adalah 5,85, sedangkan nilai maksimumnya mencapai 7,68. Rata-rata DAU berada di angka 6,9507 yang mengindikasikan besarnya distribusi dana umum secara keseluruhan. Nilai standar deviasi sebesar 0,44442 menunjukkan bahwa variasi nilai DAU di antara kabupaten relatif kecil, atau distribusinya cenderung homogen.

#### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Analisis deskriptif untuk variabel DAK. Nilai terendah yang tercatat adalah 4,26 dan yang tertinggi adalah 7,34. Rata-rata DAK yang diterima adalah 5,9943, yang mencerminkan kecenderungan umum alokasi dana khusus. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0,63107 menunjukkan tingkat keragaman data DAK yang sedang, dengan penyebaran nilai yang tidak terlalu menyimpang dari rata-rata.

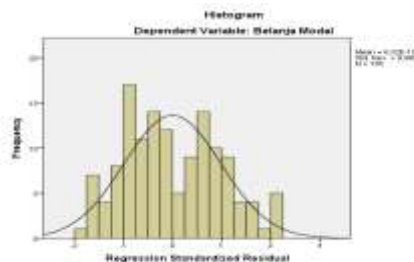
#### d. Belanja Modal

Nilai terendah belanja modal adalah 4,05, sedangkan nilai tertinggi mencapai 7,44. Nilai rata-rata belanja modal berada di angka 6,0348, yang menggambarkan pengeluaran umum kabupaten dalam bentuk investasi atau aset tetap. Dengan standar deviasi sebesar 0,70600, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi moderat dalam besarnya belanja modal di antara kabupaten selama periode penelitian.

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

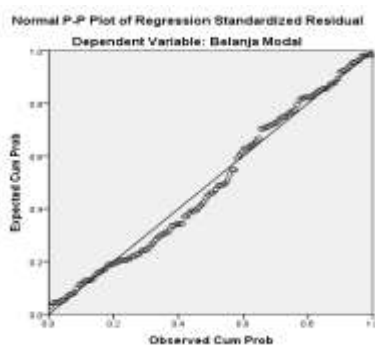
### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan dalam menilai apakah data dari variabel bebas maupun variabel terikat dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Pendekatan digunakan untuk menguji normalitas data, di antaranya melalui penyajian grafik histogram, normal probability plot (P-P Plot), serta analisis statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 1. Grafik Histogram

Hasil uji grafik histogram tampak bahwa pola distribusi data residual tidak membentuk kurva lonceng (bell-shaped) yang umumnya menunjukkan distribusi normal. Ketidaksesuaian bentuk histogram tersebut menandakan bahwa sebaran data residual tidak mengikuti distribusi normal, sehingga untuk memperkuat hasil tersebut, dilakukan dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot (Normal P-P Plot) sebagai metode uji pembandingan



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Dapat diketahui bahwa titik-titik data residual tersebar mengikuti pola garis diagonal, yang menandakan adanya kecenderungan distribusi residual mendekati distribusi normal. Hasil visual ini mendukung bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dari pendekatan grafik P-Plot, residual dapat dikatakan lolos uji normalitas. Untuk memastikan hasil ini, pengujian dilanjutkan menggunakan pendekatan statistik, yaitu Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. Hasil Uji *Kolmogorof-Smirnov*

		<b><i>Unstandardized Residual</i></b>
N		135
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,46800533
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,073
	<i>Positive</i>	0,073
	<i>Negative</i>	-0,054
<i>Test Statistic</i>		0,073
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,075 <sup>c</sup>

Sumber: *Output SPSS 25*

Diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,75, jauh di atas ambang batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini lolos uji normalitas berdasarkan metode *Kolmogorov-Smirnov*, yang sekaligus memperkuat validitas asumsi distribusi normal dalam analisis regresi yang dilakukan

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menilai apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengidentifikasi potensi multikolinieritas, digunakan dua indikator utama, yakni nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model dianggap tidak bermasalah jika VIF berada di bawah angka 10 dan nilai Tolerance melebihi 0,10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Bagi Hasil	0,671	1,491
Dana Alokasi Umum	0,149	6,704
Dana Alokasi Khusus	0,155	6,448

Dapat diketahui bahwa dari uji multikolinieritas variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus nilai Tolerance lebih dari 0,1 yaitu 0,671; 0,149; 0,155 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,491; 6,704; 6,448 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing variabel.

#### 4.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam konteks regresi linier dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau keterkaitan antara nilai error (residual) pada periode saat ini (t) dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi, dua alat uji statistik yang umum digunakan adalah Uji *Durbin-Watson* dengan syarat  $Du < d < 4 - du$  dan *Run Test* dengan syarat lebih dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji *Durbin-Watson*

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,47333	1,923

Berdasarkan data yang ditampilkan diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,923. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, jumlah observasi sebanyak 135, dan jumlah variabel independen sebanyak 3, maka diperoleh nilai batas bawah (DL) sebesar 1,6738 dan batas atas (DU) sebesar 1,7645. Karena nilai *Durbin-Watson* berada di antara kedua batas tersebut,  $Du < d < 4 - du$  yaitu  $1,7645 < 1,923 < 2,2355$ , maka dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan serial antara error pada periode yang berbeda, sehingga asumsi klasik regresi mengenai independensi residual telah terpenuhi.

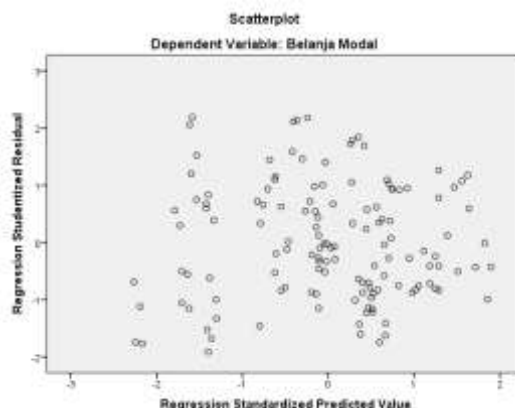
Tabel 5. Hasil Uji *Run Test*

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-0,04692
Cases < Test Value	67
Cases $\geq$ Test Value	68
Total Cases	135
Number of Runs	65
Z	-0,604
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,546

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi  $0,546 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual di antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Dalam suatu model regresi yang ideal dan memenuhi asumsi klasik, seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas karena kondisi ini dapat menyebabkan bias pada hasil estimasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah melalui analisis grafik scatterplot dan uji Glatjer.



Gambar 5. Hasil Uji Grafik *Scatterplot*

Dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik tersebar secara acak di sekitar sumbu Y, baik di bagian atas maupun bawah, tanpa menunjukkan pola yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diuji tidak mengalami masalah heteroskedastisitas untuk mendukung hasil uji ini dilakukan uji *Glejser*.

Tabel 6. Hasil Uji *Glejser*

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3,058	0,003
Dana Bagi Hasil	0,683	0,496
Dana Alokasi Umum	-0,865	0,389
Dana Alokasi Khusus	-0,563	0,574

Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil sebesar 0,496, Dana Alokasi Umum sebesar 0,389, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,574. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas ambang batas 0,05, dari hasil tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

### 4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana satu variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh beberapa variabel independen (X).

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
1 (Constant)	-1,954	0,816
Dana Bagi Hasil	0,229	0,075
Dana Alokasi Umum	1,032	0,238
Dana Alokasi Khusus	-0,054	0,165

Dapat diketahui hasil analisis linier regresi berganda sebagai berikut:  $Belanja\ Modal = -1,954 + 0,229\ DBH + 1,032\ DAU - 0,054\ DAK$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, dapat ditafsirkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- Nilai konstanta (intersep) sebesar -1,954 mengindikasikan bahwa jika seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memberikan kontribusi atau bernilai nol, maka Belanja Modal diprediksi akan mengalami perubahan sebesar -1,954 satuan.
- Jika nilai  $b_1/DBH$  (X1) sebesar 0,229 artinya jika variabel DBH (X1) bertambah 1 satuan, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,229 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Begitu juga sebaliknya, jika DBH berkurang 1 satuan maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,229 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Mencerminkan hubungan positif antara Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal.

- c. Jika nilai  $b_2/DAU (X_2)$ , nilai koefisien sebesar 1,032 yang artinya jika variabel DAU ( $X_2$ ) bertambah 1 satuan, maka Belanja Modal ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 1,032 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Begitu juga sebaliknya, jika DAU ( $X_2$ ) berkurang 1 satuan, maka Belanja Modal ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar 1,032 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal.
- d. Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, jika nilai  $b_3$  merupakan DAK ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,054 yang artinya jika variabel DAK ( $X_3$ ) bertambah 1 satuan, maka Belanja Modal ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar 0,054 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Begitu juga sebaliknya, jika DAK ( $X_3$ ) berkurang 1 satuan, maka Belanja Modal ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,054 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Artinya, peningkatan DAK belum tentu berdampak langsung pada peningkatan belanja modal.

#### 4.3.2 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	37,440	3	12,480	55,704	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	29,350	131	0,224		
	Total	66,790	134			

Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Selain itu, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 55,704 dihitung berdasarkan jumlah sampel sebanyak 135 dan tiga variabel prediktor, yang menghasilkan derajat kebebasan ( $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 132$ ). Dari parameter tersebut diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,673218. Karena  $F_{hitung}$  jauh melebihi nilai  $F_{tabel}$ , yaitu  $55,704 > 2,673218$ , maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen Dana Bagi Hasil ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), dan Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal ( $Y$ ). Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak dan valid untuk digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian ini.

#### 4.3.3 Hasil Uji t

Dalam studi ini, uji t diterapkan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari setiap variabel bebas dalam model.

Tabel 9. Hasil Uji t

Model		<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
1	(Constant)	-2,394	0,018	
	Dana Bagi Hasil	3,041	0,003	Berpengaruh
	Dana Alokasi Umum	4,330	0,000	Berpengaruh
	Dana Alokasi Khusus	-0,329	0,743	Tidak Berpengaruh

Dapat diketahui nilai  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 132$  dengan nilai signifikansi 0,05 dan  $t_{tabel}$  adalah 1,65648

- a) Dana Bagi Hasil nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung}$   $3,041 > 1,65648$   $t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja modal.
- b) Dana Alokasi Umum nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung}$   $4,330 > 1,65648$   $t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal.
- c) Dana Alokasi Khusus nilai signifikansi sebesar  $0,743 > 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung}$   $0,329 < 1,65648$   $t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

#### 4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen, yang ditunjukkan melalui nilai *adjusted R-Square*.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,749 <sup>a</sup>	0,561	0,551	0,47333

Dari hasil Uji Koefisien Determinasi, diperoleh nilai *adjusted R-square* sebesar 0,551. Angka ini mengindikasikan bahwa kombinasi variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 55,1% variasi yang terjadi dalam Belanja Modal. Sementara itu, sisa variabilitas sebesar 44,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi linier yang dibangun dalam penelitian ini, yang mungkin variabel lainnya yang berpengaruh terhadap belanja modal ataupun melibatkan unsur kebijakan fiskal.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dengan nilai signifikansi sebesar 0,03 dan koefisien regresi 0,229. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ganesh Aji Wisnuwardana (2023)[15] di Jawa Timur, namun berbeda dengan studi Andreas Ell Nugroho dan Meiril Hardi (2018)[3] di Jawa Barat yang tidak menemukan pengaruh signifikan DBH terhadap belanja modal.

DAU juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal, tercermin dari nilai signifikansi 0,00 dan koefisien regresi sebesar 1,032. Fleksibilitas penggunaan DAU memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana secara optimal pada sektor prioritas. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Rustiana Marheni dan Eko Triyanto (2023)[2] di Provinsi Jawa Tengah, meskipun bertentangan dengan temuan Nugroho dan Hardi (2018)[3] di Jawa Barat yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan.

Sebaliknya, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dengan nilai signifikansi sebesar 0,743 dan koefisien regresi -0,329. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan penggunaan DAK tidak secara langsung mendorong peningkatan belanja modal, bahkan berpotensi menurunkan kontribusi belanja modal dari dana APBD. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan DAK oleh pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nugroho dan Hardi (2018)[3] di Jawa Barat, serta Rauty Fajar Aqnisa (2016)[5] di Jawa Tengah yang juga menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya peran DBH dan DAU dalam mendukung belanja modal pemerintah daerah, sementara efektivitas DAK masih perlu ditinjau ulang dalam konteks pengalokasian anggaran pembangunan daerah.

#### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. DBH memberikan kontribusi penting dalam mendanai sektor-sektor produktif, sementara fleksibilitas DAU memungkinkan alokasi anggaran yang efektif untuk pembangunan prioritas. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang kemungkinan disebabkan oleh sifatnya yang terikat (*earmarked*), sehingga membatasi fleksibilitasnya dalam mendukung belanja modal secara menyeluruh. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan sumber dana transfer untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengadaan guna mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap Belanja Modal dan pembangunan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Insentif Daerah, memperpanjang periode analisis, serta menggunakan pendekatan metode dan sumber data yang lebih variatif agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lapangan juga dianjurkan untuk memperkuat temuan empiris terkait pengaruh dana transfer terhadap belanja modal daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chika Angellia, “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL SKRIPSI,” p. 75, 2022.
- [2] Rustiana Marheni and Eko Triyanto, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,” *J. Cakrawala Ilm.*, vol. 2, no. 11, pp. 4223–4240, 2023.
- [3] A. E. Nugroho and M. Hardi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014,” *JEA17 J. Ekon. Akunt.*, vol. 3, no. 02, pp. 9–18, 2018.
- [4] A. Widiyanto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018,” 2020.
- [5] R. F. Aqnisa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal,” no. 1, p. 6, 2016.
- [6] P. N. 21 T. 2011 T. P. P. K. Daerah, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, vol. 53, no. 9. Jakarta, 2011, pp. 167–169.
- [7] U.-U. R. I. N. 32 T. 2004 T. P. Daerah, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, no. May. Jakarta, 2004, p. 352.
- [8] U. N. 17 T. 2003 T. K. Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, no. 1. Jakarta, 2003, pp. 1–40.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2020, pp. 1–445.
- [10] G. A. G. I. A. Putri, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kota Magelang Tahun 2009-2020,” 2022.
- [11] P. M. K. R. N. 127/PMK. 02/201. T. K. Anggaran, *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta, 2015, pp. 1–34.
- [12] U. N. 33 T. 2004 T. P. K. A. P. P. D. P. Daerah, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, vol. 2004, no. May. Jakarta, 2004.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [14] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- [15] G. A. Wisnuwardana, “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal,” *J. Samudra Ekon.*, vol. 8, no. 1, pp. 402–412, 2023.